

## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Fandy Kurniawan Mudawari<sup>1)</sup>, Umaruddin Usman<sup>2)</sup>, Reza Juanda<sup>3)</sup>, Fanny Nailufar<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

<sup>1</sup>[fandymudawari@gmail.com](mailto:fandymudawari@gmail.com)

Corresponding Author : <sup>2</sup>[umaruddin@unimal.ac.id](mailto:umaruddin@unimal.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of fiscal decentralization, government expenditure, and economic growth on poverty in Aceh provincial districts/cities in 2014-2020. The variables in this study are poverty as a dependent variable and fiscal decentralization with indicators of local Revenue, government spending, and economic growth as independent variables. The data used in this study is obtained from the Central Statistics Agency for 23 regencies/cities of Aceh province. The analysis method used is the regression of panel data with a random effect approach. The analysis gives the conclusion that the original income of the region, government spending, and economic growth insignificant influence on poverty.*

**Keywords:** Poverty, Local Revenue, Government Expenditure, Economic Growth

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2014-2020. Variabel dalam penelitian ini adalah kemiskinan sebagai variabel dependen dan desentralisasi fiskal dengan indikator pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk 23 Kabupaten/Kota provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan random effect. Analisis memberikan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi

### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang membingungkan di suatu negara karena kemelaratan tidak hanya terkait dengan masalah rendahnya tingkat upah dan penggunaan, tetapi juga rendahnya tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan lemahnya masyarakat miskin untuk mengambil bagian dalam siklus perbaikan. Sebagai aturan umum, kebutuhan dicirikan sebagai suatu kondisi di mana ada kegagalan untuk mengatasi masalah-masalah penting, misalnya, makanan, pakaian, tempat berlindung, sekolah, dan kesejahteraan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencirikan kemelaratan sebagai suatu keadaan hidup yang

ditolak sama sekali yang dialami oleh seseorang atau keluarga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidupnya yang baik. (Fithri & Kaluge, 2017)

Aceh sebagai provinsi paling barat di Indonesia terus berjuang untuk keluar dari zona kemiskinan sebagai dampak dari konflik selama 30 tahun dan bencana alam. Meskipun Kemiskinan provinsi Aceh menurun dari tahun ke tahun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional dan sepuluh besar provinsi dengan Kemiskinan tertinggi di Indonesia (Baihaqi & Puspitasari, 2020)

Menurut Hutabarat & Sriyono, (2013) Desentralisasi moneter secara tegas akan mempengaruhi penurunan jumlah individu yang membutuhkan dengan asumsi bahwa itu diikuti oleh ekspansi dalam pembayaran per kapita. membayar adalah kesan ekspansi dalam pembangunan keuangan. Daerah potensial akan menciptakan barang sebagai tenaga kerja dan produk yang memiliki motivasi di balik perluasan penawaran dan daya tarik pelanggan. Hutabarat & Sriyono, (2013) juga menemukan bahwa desentralisasi moneter dapat membedakan masalah misi dan dapat menjadi pendorong utama untuk kemungkinan pengembangan keuangan di daerah independen. Pengembangan keuangan dapat memperluas jumlah posisi sehingga dapat mengurangi jumlah orang yang membutuhkan. Potensi bisnis yang diperluas pintu terbuka dapat mempertahankan satu ton pekerjaan dengan tujuan agar orang miskin dapat berkurang.

Menurut Aulia, (2014) menyatakan bahwa dalam desentralisasi moneter berapa banyak pertukaran aset di daerah dapat memiliki hubungan positif untuk bekerja pada bantuan pemerintah individu. Desentralisasi keuangan dapat mendukung pembayaran per kapita di kabupaten-kabupaten untuk mengurangi penduduk yang kurang beruntung dan di sisi lain upah per kapita yang rendah akan meningkatkan jumlah individu miskin. Untuk mendukung pergantian wilayah, salah satu modal yang digunakan diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD). Secara hipotetis, perkiraan kebebasan provinsi diperkirakan dari Pendapatan Asli Daerah (Fitriyanti & Handayani, 2020)

Elemen yang berbeda mengurangi seberapa banyak kebutuhan, misalnya, pengeluaran pemerintah yang secara eksplisit dialokasikan di bidang sekolah dan kesejahteraan, total output nasional provinsi dan upah terendah lokal. Kesejahteraan dan pelatihan yang memadai dapat mempengaruhi penampilan seseorang, sehingga kelemahan kronis dan kondisi sekolah dapat membuat seseorang terjebak dalam pola kemiskinan. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu bagian dari pengaturan keuangan yang bertujuan untuk memperluas laju usaha, membuka pintu bisnis yang berharga, mengikuti kesehatan keuangan dan membuat alokasi gaji yang tidak memihak (R. Amalia & Rahman Razak, 2015)

Dalam teori Putrayuda et al., (2017) menjelaskan apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan akan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Begitu juga menurut Anggraini et al., (2022) bahwa pengeluaran administrasi bukan hanya untuk menunjang agar kegiatan pemerintahan dapat terus dilakukan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi yang mengacu pada pembangunan moneter, mengurangi ketimpangan gaji atau yang disebut dengan sirkulasi gaji, mengurangi kebutuhan sehingga dapat bekerja pada bantuan pemerintah perorangan. Menurut Didu & Fauzi, (2016) bahwa ada hubungan negatif antara perkembangan keuangan dan tingkat kemiskinan. Ekspansi dalam pembangunan keuangan akan mengurangi tingkat kebutuhan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pembangunan keuangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pendapatan per kapita berkontribusi terhadap PAD sehingga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. N. R. N. S. Pratama & Utama, (2019) dan cakupan penelitian ini adalah 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2014-2020, Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bukti baru terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Aceh, sehingga dapat dijadikan aspirasi bagi pengambil keputusan dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut akan dilakukan penelitian permasalahan tentang kemiskinan dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh”.

### **Kemiskinan**

World Bank mencirikan kebutuhan sebagai ketidakberdayaan untuk memenuhi pedoman hidup dasar. Pada tahun 2004, Bank Dunia mengklasifikasi ulang arti kemiskinan secara lebih rinci, menjadi lebih spesifik, "Kebutuhan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah kekurangan tempat untuk hidup. Kemiskinan sedang dilemahkan dan tidak memiliki pilihan untuk menemui spesialis. t mendekati sekolah dan tidak tahu bagaimana membaca dengan teliti. Kemiskinan tidak memiliki pekerjaan dan penderitaan hidup di kemudian hari. Kemiskinan adalah kekurangan anak-anak karena infeksi yang disebabkan oleh air yang kotor. Kemiskinan adalah kelemahan, tidak adanya penggambaran dan kesempatan” (Soleh, 2015)

Kemiskinan menurut Sudewi & Wirathi, (2013) mendefinisikan sebagai kekurangan ukuran dasar penggunaan, penginapan, dan pakaian yang diharapkan dapat menopang diri sendiri selamanya. Menurut BPS (2012), Kemiskinan dipandang sebagai ketidakberdayaan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan yang diperkirakan dari sisi konsumsi. Ide kemelaratan dari Bappenas adalah untuk menganggap kemelaratan sebagai suatu kondisi di mana seorang individu atau perkumpulan, orang-orang, tidak dapat memenuhi kebebasan mendasar mereka untuk mengikuti dan membina kehidupan yang terhormat.

Menurut Bappenas, hak-hak istimewa yang penting adalah pemenuhan persyaratan untuk makanan, kesejahteraan, sekolah, bisnis, penginapan, air bersih, tanah, aset reguler dan iklim, perasaan aman dari perlakuan atau bahaya kebrutalan dan pilihan untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial politik, baik untuk semua jenis orang. Secara keseluruhan, akhir dari makna kemelaratan dapat diartikan sebagai kegagalan seseorang untuk mengatasi masalah yang berbeda seperti pakaian, pangan dan papan (Sudewi & Wirathi, 2013)

Menurut Y. C. Pratama, (2019) Ditinjau dari kelompok sasaran, terdapat beberapa jenis kemiskinan. Penggolongan jenis kemiskinan ini dimaksudkan agar setiap tujuan program memiliki sasaran dan target yang jelas. Sumodiningrat (1999) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1). Kemiskinan absolut (pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya).
- 2). Kemiskinan relatif (situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas).
- 3). Kemiskinan struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut).

### **Desentralisasi Fiskal**

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 dalam hal pemerintahan, kemerdekaan provinsi adalah hak, wewenang dan komitmen daerah mandiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan jaringan lingkungan sesuai dengan pedoman hukum. Kemandirian provinsi adalah otonomi atau kesempatan untuk menentukan pedoman mereka sendiri berdasarkan peraturan, dalam menangani kebutuhan lokal sesuai dengan kapasitas dan kapasitas mereka yang sebenarnya untuk menangani masalah kewilayahan. Desentralisasi keuangan adalah penunjukan kekuasaan dan kewajiban dari pemerintah pusat ke negara bagian terdekat untuk kemampuan publik atau menunjuk ke arah bekerja pada bantuan pemerintah individu.

Dalam Sudewi & Wirathi, (2013) Desentralisasi fiskal adalah penunjukan kekuasaan dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada negara-negara tetangga untuk kemampuan publik atau mereka yang ditunjuk untuk bekerja pada bantuan pemerintah individu. Ide desentralisasi keuangan disebut juga (*cash follow ability*), dan itu menyiratkan bahwa penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh penyebaran ahli di bagian mendapatkan subsidi.

Menurut Galela, (2016) Dua macam penunjuk desentralisasi keuangan yang sering digunakan adalah penanda gaji dan penanda konsumsi. Pointer pembayaran adalah proporsi pendapatan pemerintah terdekat yang diperoleh dari kapasitas sendiri (misalnya PAD) dengan gaji absolut provinsi. Semakin penting nilai penunjuk ini (semakin mirip), semakin penting pemberian kekuasaan atas sumber pendapatan. Galela, (2016) juga menambahkan bahwa penanda konsumsi adalah proporsi penggunaan lokal yang dapat dibagikan secara terbuka oleh pemerintah provinsi untuk dijumlahkan dengan penggunaan teritorial. Semakin penting nilai penunjuk ini, semakin tinggi penunjukan kekuasaan kepada legislatif lingkungan dalam mengalokasikan rencana belanja daerah. Contoh belanja yang bebas dialokasikan adalah belanja yang bersumber dari PAD dan DAU. Sedangkan dana yang bersumber dari DAK, penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan indikator yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu indikator pendapatan (PAD).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Jolianis (2016) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberdayakan pembangunan moneter daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memicu dan memacu perkembangan moneter daerah menjadi lebih baik dibandingkan dengan perkembangan keuangan provinsi sebelumnya. Daerah dengan perkembangan keuangan yang positif berpeluang untuk mendapatkan perluasan di PAD. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat meningkatkan dan meningkatkan aksi di bidang-bidang yang terkait dengan pembangunan moneter, misalnya bidang modern dan pertukaran.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 menyebutkan, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sumber PAD berasal dari belanja daerah, tugas provinsi, hasil organisasi yang diklaim secara teritorial serta akibat penanganan sumber daya daerah terpendil lainnya, dan gaji asli daerah lainnya (Manduapessy, 2020)

### **Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Ahmad, (2018) Konsumsi penggunaan pemerintah yang biasa disebut penggunaan pemerintah, penggunaan pemerintah atau pembelian pemerintah mencakup semua penggunaan yang dengannya otoritas publik mendapatkan kompensasi secara langsung. Pengeluaran pemerintah sangat penting karena termasuk hasil yang diciptakan untuk membantu kehidupan banyak orang. Besarnya pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu bergantung pada banyak variabel, antara lain: besarnya biaya yang akan diperoleh, tujuan moneter yang ingin dicapai, serta pertimbangan politik dan keamanan sehingga cenderung dianggap bahwa administrasi pembelanjaan dalam periode tertentu dan perkembangannya dari satu periode ke periode lainnya tidak bergantung pada pembangunan gaji dan pembayaran publik yang adil dan merata.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat kebijakan fiskal utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) mencakup prioritas pembangunan, khususnya prioritas kebijakan dan tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan belanja daerah sesuai dengan sumber daya yang tersedia, yang dicapai baik melalui sistem transfer maupun pajak

daerah dan daerah. Penetapan prioritas tersebut dan upaya pencapaiannya merupakan hasil dari semakin besarnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut BPS, pengembangan moneter adalah cara paling umum untuk meningkatkan hasil (kreasi) dalam jangka panjang. Pembangunan keuangan suatu kabupaten merupakan salah satu komponen utama dalam perputaran keuangan wilayah (Najmi, 2019)

Menurut Dama et al., (2016) masuk akal bahwa pembangunan moneter adalah ekspansi PDB / GN tidak terlalu memperhatikan seberapa besar atau sedikit pembangunan penduduk atau terlepas dari apakah ada perubahan dalam permintaan keuangan. Perkembangan keuangan yang cukup tinggi membuat negara-negara industri memberi lebih banyak kepada penduduknya.

Menurut Didu & Fauzi, (2016) sampai akhir tahun 1960, Analisis pasar percaya bahwa cara paling ideal untuk menemukan keterbelakangan moneter adalah dengan memperluas laju pembangunan keuangan setinggi mungkin sehingga dapat melampaui laju pembangunan penduduk. Sejalan dengan itu, angka upah per kapita akan meningkat sehingga dengan sendirinya akan terjadi peningkatan keberhasilan individu dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah individu miskin. Dengan demikian, tujuan utama dalam perbaikan keuangan lebih dipusatkan pada upaya untuk mencapai tingkat pembangunan moneter yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perbaikan yang diselesaikan di negara-negara non-industri sering menemui kesulitan antara pembangunan dan nilai.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2014 - 2020. Data yang dianalisis dalam penelitian ini yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data Desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin juga diambil dari BPS yang diakses melalui <https://www.bps.go.id/>.

### **Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang berbentuk data skunder bersifat kuantitatif yaitu laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2014 sampai 2020. tersebut diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang diakses melalui <https://www.bps.go.id/> dan <https://aceh.bps.go.id>.

### **Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X).

#### **1. Kemiskinan (Y)**

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti Sandang, pangan dan papan.

#### **2. Pendapatan Asli Daerah (X1)**

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing sebagai perwujudan menjalankan desentralisasi.

3. Pengeluaran Pemerintah (X2)

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen-instrumen pengalokasian anggaran belanja pada suatu kepentingan publik

4. Pertumbuhan Ekonomi (X3)

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa ekonomi dari satu periode ke periode selanjutnya yang mana bisa di hitung secara rill maupun nominal, pertumbuhannya ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

**Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur baik dari buku, jurnal, penelitian, serta sumber data publikasi instansi terkait. dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebanyak 23 Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Data yang diperoleh dalam data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yakni data jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikat. Desentralisasi fiskal yang diukur melalui (Pendapatan Asli Daerah), Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel bebas.

**Metode Analisis Data**

**Analisis Regresi**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel ini dinyatakan dalam model matematika maka akan digunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 \log X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan
- X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah
- X<sub>2</sub> = Pengeluara Pemerintah
- X<sub>3</sub> = Pertumbuhan Ekonomi
- log = Logaritma
- α = Konstanta
- e = error term
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>... = Koefisien regresi
- i = i.....N (Cros Section)
- t = i.....T (Time Series)

Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$KEM = \alpha - \beta_1 \log PAD - \beta_2 \log PP + \beta_3 PE$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Deskripsi Data Penelitian**

Pada skripsi ini memakai data panel merupakan campuran. antara data *time series* dan data *cross section*. Data time series nya yaitu tahun 2014-2020. Sedangkan data cross sectionnya adalah 23 Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Hasil Pengujian Multikolinieritas**

**Tabel 1**  
**Uji Multikolinieritas**

	LOG(PAD)	LOG(PP)	PE
LOG(PAD)	1.000000	0.814415	0.050524
LOG(PP)	0.814415	1.000000	-0.057384
PE	0.050524	-0.057384	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data (Eviews 9, 2022)

Berdasarkan pada tabel di atas antara variabel independen yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini tidak ada hubungan korelasi,  $< 0,08$  tetapi variabel pengeluaran pemerintah terjangkau masalah  $0.814 > 0,08$  maka dari itu penulis akan memperbaiki dengan menggunakan teknik penyembuhan asumsi klasik dengan pendekatan diferensi tingkat pertama yang dilakukan pada variabel pengeluaran pemerintah hal ini dikarenakan variabel tersebut memiliki korelasi lebih tinggi antara variabel-variabel lainnya. Adapun hasil perbaikan uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Perbaikan Uji Multikolinieritas**

	LOG(PAD)	D(LOG(PP))	PE
LOG(PAD)	1.000000	-0.041240	0.058860
D(LOG(PP))	-0.041240	1.000000	-0.027784
PE	0.058860	-0.027784	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data (Eviews 9, 2022)

Berdasarkan hasil pada Tabel di atas terdapat antara variabel independen yakni variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini tidak terdapat adanya hubungan korelasi. Berarti dalam penelitian ini terbebas multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**  
**Hasil pengujian Heteroskedastisitas**

**Tabel 3**  
**Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.707454	9.660509	0.280260	0.7796
LOG(PAD)	0.058010	0.302405	0.191828	0.8481
LOG(PP)	-0.043993	0.592893	-0.074201	0.9409
PE	0.021845	0.023305	0.937337	0.3500

Sumber: Hasil Olah Data (Eviews 9, 2022)

Berdasarkan pada tabel di atas terdapat bahwa probabilitas dari variabel PAD lebih besar dari alpha 5% ( $0.8481 > 0,05$ ), variabel Pengeluaran Pemerintah lebih besar dari alpha 5% ( $0.9409 > 0.05$ ) dan variabel Pertumbuhan ekonomi lebih besar dari alpha 5% ( $0.3500 > 0.05$ ) Maka di dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas

**Analisis Regresi Data Panel**  
**Uji Penentuan Kesesuaian Model**  
**Uji Chow**

**Tabel 4**  
**Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	80.108924	(22,135)	0.0000
Cross-section Chi-square	425.517057	22	0.0000

*Sumber: Hasil Olah Data (Eviews 9, 2022)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chi Square sebesar 0,0000 yang diperoleh dari regresi fixed effect. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas Chi-Square lebih kecil dari alpha 5% ( $0,0000 < 0,05$ ) artinya model regresi fixed effect lebih baik dari pada common effect model.

**Uji Hausman**

**Tabel 5**  
**Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.631252	3	0.0543

*Sumber: Hasil Olah Data (Eviews 9, 2022)*

Hasil yang tersaji pada tabel menunjukkan nilai probabilitas cross section random sebesar 0.0543 lebih tinggi dari alpha 5% ( $0.0543 > 0,05$ ) maka model random effect yang dinyatakan terbaik, sehingga perlu di lanjutkan dengan melakukan pengujian *lagrange multiplier*.

**Uji Lagrange Multiplier**

**Tabel 6**  
**Uji Lagrange Multiplier**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	337.9943	1.093957	339.0882
	(0.0000)	(0.2956)	(0.0000)

*Sumber: Hasil Olah Data (Eviews 9, 2022)*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cross section Breusch- Pagan sebesar 0,0000 lebih rendah dari alpha 5% (0,0000 0,05), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan model Random Effect. Dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan lagrange multipler maka model terpilih random effect.

**Analisis Data Panel**

**Uji Random Effect**

Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model dampak tidak beraturan. Hal ini harus dilihat dari hasil uji assurance terhadap strategi penilaian model informasi dewan dalam konsentrasi ini pada tabel sebelumnya. Selanjutnya adalah efek tindak lanjut dari model perulangan dampak tidak beraturan yang dipilih dalam tinjauan ini.

**Hasil Pengujian Fixed Effect Model**

$$KEM = 53.10841 - 1.212483logPAD - 0.688446logPP + 0.046741PE$$

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 53.10841, artinya apabila variabel pendapatan asli daerah, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi bernilai konstan = (0) atau tetap maka pengaruh Kemiskinan di 23 Kabupaten/kota Provinsi Aceh akan konstan/ tetap sebesar 53.10%. Nilai koefisien dari variabel pendapatan asli daerah sebesar -1.212483, artinya apabila terjadi peningkatan jumlah pendapatan asli daerah sebesar 1% maka akan terjadi pula penurunan pada Kemiskinan di 23 Kabupaten/kota Provinsi Aceh sebesar sebesar 1.212% dengan asumsi variabel lain di anggap konstan/ tetap. Nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar -0.688446 artinya apabila terjadi peningkatan pada jumlah Pengeluaran Pemerintah sebesar 1% maka akan terjadi penurunan Kemiskinan di 23 Kabupaten/kota Provinsi Aceh sebesar sebesar 0.688% dengan asumsi variabel lain di anggap konstan/ tetap. Nilai koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.046741 artinya apabila terjadi peningkatan pada jumlah Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan Kemiskinan di 23 Kabupaten/kota sebesar 0.046% dengan asumsi variabel lain di anggap konstan/ tetap.

**Hasil Uji Hipotesis**

**Hasil Uji Parsial (Uji t )**

**Tabel 7**  
**Uji Parsial (Uji t )**

Variabel bebas	T Stat	T tabel	alpha	Prob	Ket
Pendapatan Asli Daerah	-3.393787	1.65462	0,05	0.0009	Signifikan
Pengeluaran Pemerintah	-0.973631			0.3317	Tidak Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	1.724432			0.0866	Tidak Signifikan

*Sumber: Hasil Olah Data (Eviews 9, 2022)*

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan hasil pengujian secara parsial pada variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini dapat di lihat dalam tabel bahwa probalitas variabel pendapatan asli daerah lebih kecil dari alpha. Untuk variabel Pengeluaran Pemerintah dalam penelitian ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan, hal ini dapat di lihat dalam tabel bahwa probalitas variabel Pengeluaran

Pemerintah lebih besar dari alpha. Sedangkan variabel Pengeluaran Pemerintah dalam penelitian ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan, hal ini dapat di lihat dalam tabel bahwa probabilitas variabel Pengeluaran Pemerintah lebih besar dari alpha.

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 4.9**  
**Uji Simultan (Uji F)**

F statistik	F tabel	Alpha	Probabilitas	Keterangan
10.06255	2.66	0,05	0.000004	signifikan

Sumber : *Hasil Olah Data* (Eviews 9, 2022)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai dari Fstatistik > Ftabel ( $10.06255 > 2.66$ ) dengan nilai probabilitas sebesar ( $0.000004 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan secara Bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

**Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 4.10**  
**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Adjusted R-squared	0.145243
--------------------	----------

Sumber: *Hasil Olah Data* (Eviews 9, 2022)

Hasil Adjusted R-squared dari penelitian ini adalah sebesar 0.145243, hal ini menunjukan bahwa antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini adalah sangat lemah yaitu sebesar 14,52% sedangkan 85,485% lainnya di pengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini dapat di lihat dalam tabel bahwa probalitas variabel pendapatan asli daerah lebih kecil dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi pengalokasian dan pengelolaan dana yang bersumber dari PAD cukup baik, mengingat nilai PAD yang cukup besar dan terus naik setiap tahunnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan program-program penanggulangan kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh setiap tahunnya kontinyu mengalami penurunan seiring terus bertambahnya proporsi PAD setiap tahunnya.

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel Pengeluaran Pemerintah dalam penelitian ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan, hal ini dapat di lihat dalam tabel bahwa probalitas variabel Pengeluaran Pemerintah lebih besar dari alpha. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah, maka akan semakin turun tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh . Dengan demikian, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengeluarannya

terutama pada alokasi belanja modal ataupun pengembangan infrastruktur, sehingga kemiskinan di Provinsi Aceh bisa berkurang.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini berpengaruh positif dan tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dalam tabel bahwa probabilitas variabel Pertumbuhan Ekonomi lebih besar dari alpha. Dari penjelasan ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil ini tidak sesuai dengan spekulasi dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pembangunan moneter berdampak buruk pada tingkat kebutuhan di Provinsi Aceh.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, Pada variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara individu Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Di Provinsi Aceh. Dan secara individu Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Dari hasil Adjusted R-Squared yang menunjukkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang sangat lemah yang berarti ada beberapa variabel lain diluar penelitian ini.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu, Desentralisasi bukan hanya untuk administrasi moneter tetapi juga untuk masalah organisasi dan legislatif, oleh karena itu mengarahkan penyelidikan yang lebih merata terhadap citra desentralisasi sangat penting.

Kebijakan pemerintah Aceh harus lebih dapat diandalkan dan berpusat pada pemahaman rencana pengeluaran yang diarahkan pada program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan lebih lanjut administrasi publik sehingga dapat bekerja pada bantuan pemerintah individu dan memiliki pilihan untuk secara tegas mempengaruhi pembangunan keuangan dan pelonggaran kebutuhan.

Pembangunan keuangan harus mencakup investasi seluruh rakyat sehingga penggunaan pembangunan moneter dapat lebih merata tersampaikan, tidak hanya terjadi karena perluasan keuangan kelompok orang kaya, jika keuntungan dari perkembangan keuangan hanya disenangi oleh sekelompok orang kaya. Ini mempengaruhi perluasan tingkat kebutuhan dan perbedaan gaji.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, N. A.-M. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gresik. 1–9.
- Amalia, R., M. & Razak, A. R., 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, pp. 183-189.
- Anggraini, D., M. & S., 2022. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Angewandte Chemie International Edition*, pp. 6(11), 951-952., 4(1), 10-27.
- Baihaqi, A. B., & Puspitasari, P. (2020). Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal Publicuho*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12272>

- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129.
- Galela, M. R., 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Perlukah Desentralisasi Fiskal Diperluas?. pp. 59-68.
- Hutabarat, E. & D. S., 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. pp. 1-10.
- Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic and Economic Education*, 4(2), 192–209.
- Mandupessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 4(2), 39–57.
- Najmi, I. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia : Panel Data 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 3(1), 36–47.
- Pratama, N. . R. N. S. & Utama, M. S., 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, pp. 651-680.
- Pratama, Y. C., 2019. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, pp. 1-15.
- Putrayuda, T. F. P., Efni, Y. & K., 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, pp. 198-224.
- Sudewi, N. N. A., & Wirathi, I. G. A. P. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 135–141.
- Soleh, A., 2015. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, pp. 197-209.